

Aksi PEGIDA Terhadap Pengungsi Muslim di Jerman

Ghina Nur Rofiidah¹, Muhammad Yusra², Rifki Dermawan³

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Andalas, Kota Padang, Indonesia

¹ghinaro@gmail.com; ²muhammadyusra@soc.unand.ac.id; ³rifkidermawan@soc.unand.ac.id

Abstrak

This research examines the actions of Patriotic Europeans Against the Islamization of the West (PEGIDA) towards Muslim refugees in Germany through the framework of Islamophobia as formulated by the Runnymede Trust. The study utilizes a qualitative methodology with a descriptive-analytical research design to comprehend the nature and implications of PEGIDA's anti-Muslim sentiments and actions within the broader context of the refugee crisis in Germany. The research begins by discussing the refugee crisis and the development of Islamophobia in Germany, which serves as the rationale for the rise of PEGIDA. The study identifies the main objectives of the group and the prevailing public sentiments towards Muslim refugees. Based on the Islamophobia framework, this research analyzes the ideological foundations and strategies employed by PEGIDA. The conceptual framework examines aspects of prejudice, stereotypes, and discriminatory practices faced by the Muslim community due to PEGIDA's actions, which contribute to the academic discourse on Islamophobia, right-wing movements, and refugee integration in Europe. The results of this research reveal that PEGIDA's actions, based on aspects of Islamophobia, have created divisions between the society and refugees that can lead to crimes. The government has also made several efforts to address this issue, including reapplying the Dublin Regulation and collaborating with Turkey.

Keywords: PEGIDA, Islamophobia, Muslim Refugees, Refugee Crisis, Germany

PENDAHULUAN

Konflik Arab Spring yang terjadi di beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2011 telah menyebabkan masuknya pengungsi yang sangat besar ke negara-negara lain, termasuk Eropa. Pengungsi ini terutama muncul akibat perang saudara yang terjadi di beberapa negara, seperti Libya dan Suriah. Menurut data yang dikeluarkan oleh UNHCR, pada tahun 2020 terdapat sekitar 6,7 juta orang pengungsi Suriah di seluruh dunia.

Permasalahan pengungsi telah diatur dalam konvensi 1951 dan protokol 1967 yang merupakan dokumen hukum internasional yang mengatur hak-hak

pengungsi dan kewajiban negara-negara dunia dalam menangani masalah pengungsi. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi tersebut diantaranya *non-refoulement*, non-diskriminasi, dan memberikan perlindungan bagi pengungsi.

Pada tahun 2015 sekitar 1,2 juta orang memohon untuk mendapatkan status pengungsi di Eropa. Jumlah terbesar datang dari Suriah, yaitu sekitar 362.800 (29%) orang, disusul oleh Afghanistan dengan sekitar 178.200 (14%) orang, dan Irak dengan sekitar 121.500 (10%) orang. Negara-negara di Eropa yang paling banyak menerima pengungsi pada tahun 2015 adalah Jerman, yaitu sekitar 441.800 (35%) orang, disusul oleh Hungaria dengan sekitar 174.400 (12%) orang, dan Austria dengan sekitar 85.500 (7%) orang. Banyak pengungsi yang datang ke Eropa menggunakan jalur laut dari Turki ke negara-negara Eropa selatan, terutama ke Yunani dan Italia. Namun, ada juga yang menggunakan jalur darat melalui Balkan, atau menyeberang ke Inggris melalui terowongan bawah laut Calais di Prancis.

CEAS (Common European Asylum System) adalah sistem yang dibuat oleh UE untuk menangani masalah perlindungan sementara dan penyelesaian masalah pengungsi di wilayah Eropa. CEAS terdiri dari dua bagian utama: bagian pertama adalah kebijakan yang mengatur proses pengajuan permohonan perlindungan sementara di Eropa, termasuk standar yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota dalam menangani permohonan tersebut. Bagian kedua adalah kebijakan yang mengatur proses pemindahan pengungsi ke negara-negara anggota UE, yang disebut relokasi.

Masuknya pengungsi dan imigran telah membebani sumber daya negara-negara ini dan telah menyebabkan berbagai masalah sosial-politik. Tanggung jawab penuh terhadap pengungsi telah memberikan beban asimetris kepada negara-negara perbatasan. Yunani yang menjadi perbatasan eksternal Eropa diwajibkan untuk menangani permohonan suaka dari pengungsi berdasarkan Dublin Regulation. Namun tekanan dari besarnya pengungsi yang datang membuat Yunani mengabaikan penerapan kebijakan tersebut. Dari segi ekonomi,

beberapa negara berjuang untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi yang datang. Sehingga hal ini berdampak pada meningkatnya beban pelayanan publik.

Munculnya gerakan populisme sayap kanan pada negara-negara terdampak, memanfaatkan sentimen anti-imigran untuk menolak pemberian suaka kepada pengungsi. Kelompok tersebut beranggapan bahwa pengungsi dapat mengancam kepentingan dan identitas nasional negara. Dalam beberapa kasus, anggapan tersebut dapat membentuk sikap rasisme serta serangan terhadap pengungsi dan imigran.

Pada tahun yang sama, peristiwa terorisme terjadi di Paris yang disebabkan oleh pengungsi ilegal yang datang dari Yunani. Partai politik sayap kanan mengaitkan insiden tersebut dengan masuknya pengungsi Muslim yang terus berdatangan ke Eropa yang kemudian berdampak pada meningkatnya xenophobia dan Islamophobia di seluruh Eropa.

Islamophobia telah menjadi kekhawatiran publik terhadap krisis pengungsi di negara-negara Eropa terutama Jerman. Jerman menerapkan kebijakan terbuka dengan menerima sekitar 800.000 pengungsi yang sebagian besar berasal dari negara Muslim. Tindakan Jerman tersebut telah menimbulkan sejumlah kritikan dan protes dari negara-negara Eropa maupun masyarakat Jerman.

Protes dilakukan oleh gerakan sayap kanan PEGIDA (Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West) yang mengklaim diri mereka sebagai patriot yang membela Jerman dari "Islamisasi". PEGIDA menggunakan retorika anti-Islam untuk menimbulkan ketakutan publik serta mempromosikan ujaran kebencian dan intoleransi terhadap Muslim dan pengungsi.

Pandangan anti-Islam tidak muncul di Jerman secara tiba-tiba atau dalam periode waktu tertentu. Dilihat dari sejarah Jerman, diskriminasi terhadap pengungsi telah ada sejak lama. Pada masa pra-Holocaust, retorika anti-Semitik dan anti-imigrasi digunakan untuk menjustifikasi diskriminasi dan penganiayaan terhadap orang Yahudi dan orang asing di Jerman. Namun saat ini pandangan

tersebut beralih pada retorika anti Islam melalui gerakan PEGIDA yang memiliki kesamaan ideologi dan politik di era Nazi.

Selain itu kegagalan politik multikulturalisme yang diterapkan oleh Angela Merkel berkontribusi dalam perkembangan Islamophobia. Jerman memiliki undang-undang kebebasan beragama pada pasal 4 ayat 1. Berdasarkan undang-undang tersebut Jerman harus mengakui hak Muslim. Tapi pemerintah justru meningkatkan pembatasan terhadap imigran Muslim dan mendukung Islamophobia. Bangkitnya Islamophobia dapat mengancam nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, persatuan dan keragaman. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aksi PEGIDA sebagai wujud Islamophobia terhadap pengungsi Muslim di Jerman.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana kelompok PEGIDA terbentuk, apa tujuan dan taktik mereka dalam menyebarkan propaganda anti-pencari suaka dan Islamophobia, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Jerman dan pencari suaka yang berada di sana. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan latar belakang munculnya gerakan PEGIDA, termasuk dampak dari krisis pengungsi di Eropa pada tahun 2015, serta ideologi dan taktik yang digunakan oleh gerakan ini. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak dari propaganda anti-pencari suaka dan Islamophobia yang disebarkan oleh gerakan PEGIDA terhadap masyarakat dan politik di Jerman, termasuk meningkatnya polarisasi dan konflik antara kelompok masyarakat yang berbeda.

Penelitian kedua bersumber pada penelitian Lunya Adelina Pertiwi dalam artikel jurnal “Kompleksitas Rezim di UE: Upaya Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka”. Penelitian ini menjelaskan tentang kompleksitas rezim di UE dan upaya Jerman dalam mendukung UE untuk mengurangi kompleksitas rezim dan menentukan kebijakan dalam mengatasi pengungsi dan pencari suaka. Tujuan

penggunaan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan kompleksitas dalam menangani krisis pengungsi di Uni Eropa (UE), terkhususnya negara Jerman. Penelitian ini menjelaskan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi masalah pengungsi dan pencari suaka di UE, termasuk faktor-faktor seperti konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta ketidaksetaraan ekonomi dan sosial di UE.

Penelitian ketiga merujuk pada Marco Bitschnau, Dennis Lichtenstein, dan Birte Fährlich, dengan judul “The ‘Refugee Crisis’ as an Opportunity Structure for Right-Wing Populism and Social Movements: The Case of PEGIDA”. Penelitian ini menganalisis tindakan PEGIDA khususnya mengenai retorika anti pengungsi terhadap permasalahan krisis pengungsi tahun 2015. Tujuan penggunaan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana krisis pengungsi dapat menjadi peluang bagi gerakan sosial sayap kanan populisme, dengan fokus pada kasus PEGIDA di Jerman. Artikel tersebut berusaha menjelaskan bagaimana situasi krisis pengungsi dapat memberikan kesempatan bagi gerakan sosial sayap kanan populisme untuk menarik dukungan dan meningkatkan pengaruh mereka di masyarakat.

Penelitian keempat merujuk pada penelitian Muhammad Zaki yang berjudul “Pengaruh kebijakan imigrasi terbuka terhadap kemunculan Gerakan populisme sayap kanan (PEGIDA) di Jerman tahun 2014-2016”. Penelitian ini berfokus untuk mengeksplorasi hubungan antara kebijakan imigrasi terbuka dan kemunculan gerakan populisme sayap kanan PEGIDA di Jerman pada tahun 2014-2016.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Rangga Mufades Haekal berjudul “Kemunculan PEGIDA sebagai Gerakan Anti-Islam di Jerman” membahas tentang gerakan PEGIDA yang muncul di Jerman pada tahun 2014 dan menjadi sorotan dunia karena aksi-aksi anti-Islam yang dilakukan oleh para pendukungnya. Argumen utama mengenai kemunculan PEGIDA dianggap sebagai gerakan anti-Islam di Jerman dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti

ketidakpuasan terhadap kebijakan pengungsi, kekhawatiran akan keamanan, dan ketidakpercayaan terhadap media.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menggambarkan bagaimana aksi yang dilakukan PEGIDA sebagai wujud Islamophobia terhadap pengungsi Muslim di Jerman. Keterbatasan penelitian berkisar di tahun 2015 hingga awal tahun 2023. Sejak dari tahun 2015, PEGIDA aktif menjalankan demonstrasi setiap minggu dan menyebarkan retorika anti pengungsi dan anti Islam. Selain itu, Jerman menerima pengungsi sekitar 200.000 orang setiap tahunnya setelah krisis pengungsi. Mayoritas berasal dari suriah dengan total 70.976 pengungsi.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini diperoleh dari publikasi ilmiah, penelitian, jurnal, artikel, dokumen resmi, situs resmi pemerintahan atau lembaga organisasi, dan pemberitaan media. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya dengan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengolahan data dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Dinamika Penerimaan Pengungsi Di Jerman

Sebagian masyarakat Jerman yang memiliki pandangan negatif terhadap pengungsi, cenderung menciptakan stereotip dan prasangka yang menghasilkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif yang dapat berujung pada xenophobia. Xenophobia merujuk pada ketakutan, kebencian, atau penolakan terhadap orang asing atau orang “luar” dalam konteks budaya, ras, atau etnis. Dalam konteks pengungsi, xenophobia dapat mengarah pada sikap permusuhan, kebencian, atau ketakutan yang irasional terhadap pengungsi sebagai kelompok

yang dianggap "asing" atau "ancaman" terhadap identitas, budaya, atau keamanan masyarakat Jerman.

Diskriminasi terhadap pengungsi telah terjadi sejak tahun 1904-1945, Jerman menghadapi gelombang besar pertama pengungsi dari timur yang merupakan bangsa Yahudi, hal ini diakibatkan oleh kerusuhan politik dan sosial di Kekaisaran Rusia, khususnya di Pale of Settlement di mana mayoritas bangsa Yahudi tinggal. Selama periode ini, Jerman mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Nasionalisme, teori rasial, dan sentimen anti-Semit menjadi perhatian publik. Rezim Nazi memulai kampanye anti-Semitnya, meluncurkan kampanye propaganda yang merendahkan dan menjelek-jelekkan orang Yahudi, menyalahkan mereka atas anggapan kemunduran Jerman dan mempromosikan sentimen anti-Yahudi di kalangan penduduk. Pada November 1938, Jerman menyetujui serangan kekerasan terhadap Yahudi yang diatur oleh rezim Nazi.

Pada tahun 1950-an, Jerman memasuki fase rekonstruksi dan pemulihan ekonomi. Periode ini ditandai dengan terbaginya Jerman menjadi Timur dan Barat. Setiap negara memiliki sistem politik, kebijakan ekonomi, dan ideologi yang berbeda. Insiden Rostock-Lichtenhagen, juga dikenal sebagai kerusuhan yang terjadi pada Agustus 1992 di kota Rostock, di timur laut Jerman. Insiden itu bermula pada 22 Agustus 1992, ketika kelompok ekstrimis sayap kanan bernama "Rostock National Socialist Underground" mengorganisir serangkaian protes terhadap keberadaan pencari suaka di kompleks Sonnenschein.

Kelompok itu bergabung dengan penduduk lokal, neo-Nazi, dan ekstrimis sayap kanan dari bagian lain Jerman. Peristiwa tersebut adalah salah satu contoh kekerasan xenophobia yang paling menonjol dan mengganggu di Jerman pasca-reunifikasi. Saat itu, Rostock-Lichtenhagen adalah lingkungan dengan jumlah imigran yang tinggi, terutama dari Vietnam, yang mencari perlindungan di Jerman selama akhir 1970-an dan awal 1980-an.

Islamophobia di Jerman

Peristiwa hancurnya gedung WTC pada 11 September 2001 yang merenggut kurang lebih 2996 nyawa, kemudian diikuti oleh peristiwa ledakan bom di Madrid pada 11 Maret 2004 yang merenggut 191 nyawa, serta ledakan bom di London pada 7 Juli 2005 yang merenggut nyawa 52 orang oleh teroris yang diyakini berasal dari orang-orang Muslim telah membentuk citra negatif tentang Islam di mata dunia. Islamophobia kemudian menjadi kata yang digunakan oleh masyarakat yang tidak menyukai dan takut akan keberadaan umat Islam yang dianggap akan memberikan ancaman bagi masyarakat. Serangan teroris tersebut dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstrimis yang mengklaim motivasi Islam menciptakan ketakutan dan kecurigaan global. Hal ini meningkatkan fokus pada keamanan dan berkontribusi pada gambaran Islam yang diasosiasikan dengan terorisme dalam wacana publik.

Di Jerman sendiri umat Muslim kurang mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam dunia politik. Sebagai negara sekuler, agama tidak memainkan peran penting dalam dinamika politik di Jerman, namun semenjak pengungsi masuk ke Jerman pada tahun 2015 serta aksi-aksi terorisme di Eropa mengakibatkan agama Islam dan umatnya menjadi agenda politik. Seperti dua partai besar di Jerman yakni CDU-Uni Kristen Demokrat dan SPD-Partai Sosial Demokrat sering melakukan pertemuan yang membahas Islam, budaya serta integrasi di Jerman.

Pengalaman sejarah anti-Semitisme di Jerman telah berkontribusi menjadikan agama sebagai kategori utama untuk memahami Muslim di Jerman. Hal ini menciptakan persepsi Muslim sebagai orang luar yang tidak menjadi bagian masyarakat Jerman. Sejarah imigrasi Jerman, khususnya dari Turki, berkontribusi terhadap kehadiran komunitas Muslim di negara tersebut. Namun, integrasi komunitas-komunitas ini menjadi tantangan, yang menyebabkan ketegangan dan diskriminasi. Krisis pengungsi tahun 2015, yang menyebabkan masuknya pengungsi dalam jumlah besar, banyak dari mereka adalah Muslim, ke Jerman, telah memicu sentimen anti-Muslim. Sentimen ini didorong oleh

ketakutan akan perubahan budaya dan sosial, serta kekhawatiran tentang keamanan dan terorisme. Munculnya gerakan populisme sayap kanan di Jerman, seperti PEGIDA, telah berkontribusi pada normalisasi sentimen anti-Muslim. Gerakan-gerakan ini sering menggunakan retorika anti-Muslim untuk memobilisasi basis mereka dan mempromosikan agenda politik mereka.

PEGIDA

PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, Patriotic Europeans against the Islamization of the Occident) dimulai pada tahun 2014 sebagai Grup Facebook dan menjadi terkenal melalui organisasi demonstrasi reguler di kota Dresden, Jerman Timur, sebuah kota yang terkenal dengan basis ekstrimis sayap kanannya yang kuat.

PEGIDA menarik ribuan peserta ke aksi unjuk rasa yang diadakan setiap hari Senin, meniru demonstrasi hari Senin yang meruntuhkan sistem sosialis negara Jerman Timur pada tahun 1989. Salah satu slogan yang diteriakkan pada aksi unjuk rasa PEGIDA adalah “ Kami adalah rakyat” (Wir sind das Volk). Slogan tersebut merupakan slogan yang sama yang digunakan para demonstran tahun 1989 yang memprotes rezim otoriter, yang mana para pemimpinnya tidak mendengarkan “rakyat”, dan tidak benar-benar mewakili “rakyat”.

Gerakan PEGIDA diprakarsai oleh Lutz Bachmann, seorang aktivis lokal dan salah satu pendiri perusahaan kehumasan. Bachmann sebelumnya terlibat dalam politik sayap kanan dan memiliki koneksi dengan kelompok nasionalis. Sebelum mendirikan PEGIDA, Lutz Bachmann telah terlibat dalam politik sayap kanan di Jerman. Dia adalah anggota Partai NPD (Demokratik Nasional Jerman), sebuah partai politik sayap kanan yang terkenal dengan sikap nasionalis dan xenophobianya. Bachmann telah berpartisipasi dalam kegiatan NPD dan dikaitkan dengan ideologinya.

PEGIDA muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran yang berkembang terkait dengan imigrasi, Islamisasi, dan kegagalan multikulturalisme. Gerakan tersebut memanfaatkan kecemasan publik seputar masalah ini, khususnya dalam konteks penerimaan Jerman terhadap sejumlah besar pengungsi dan imigran.

Aksi PEGIDA pertama kali berlangsung pada 20 Oktober 2014 di Dresden, menarik sekitar 350 peserta. Retorika gerakan sering mengandalkan sentimen nasionalis dan populisme, mengkritik elit politik dan mengadvokasi kepentingan "rakyat biasa". PEGIDA memosisikan dirinya sebagai gerakan akar rumput, yang mengaku mewakili warga Jerman biasa yang merasa tertinggal dari politik arus utama dan terancam oleh anggapan penyebaran Islam radikal. Gerakan ini mengklaim bahwa Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai Barat dan pemerintah serta media arus utama mengabaikan kepentingan warga negara.

Kemunculan PEGIDA bertepatan dengan meningkatnya perdebatan publik dan keprihatinan mengenai imigrasi, khususnya di Jerman. Kedatangan sejumlah besar pengungsi dan imigran dari Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2014 dan 2015 memicu kekhawatiran mengenai perubahan budaya, keamanan, dan implikasi ekonomi. PEGIDA memanfaatkan kekhawatiran ini dengan mengumpulkan individu yang merasa bahwa kecemasan mereka tidak ditangani secara memadai oleh partai politik arus utama.

Terinspirasi oleh PEGIDA di Dresden, gerakan serupa mulai bermunculan di kota-kota Jerman lainnya. Gerakan-gerakan ini mengadopsi nama lokal namun berbagi ideologi dan kekhawatiran umum yang disebarkan oleh PEGIDA. Kota-kota seperti Leipzig, Munich, Cologne, dan Stuttgart menjadi saksi berdirinya cabang-cabang lokal atau kelompok-kelompok afiliasi, mengorganisir demonstrasi dan unjuk rasa secara lokal.

Pengaruh PEGIDA tidak hanya terbatas di Jerman saja. Retorika anti-Islam dan anti-imigrasi gerakan tersebut telah menyatu dengan individu dan kelompok di negara-negara Eropa lainnya yang memiliki keprihatinan yang sama. Sehingga mulai bermunculan gerakan yang serupa di negara-negara seperti Austria, Belgia, Prancis, Belanda, dan Inggris. Gerakan-gerakan ini sering mengadakan aksi unjuk rasa dan protes, menangani masalah lokal dan memanfaatkan media sosial untuk terhubung dengan pendukung.

Kebangkitan PEGIDA bertepatan dengan meningkatnya keberhasilan elektoral dan visibilitas partai populisme sayap kanan di seluruh Eropa. Beberapa

partai ini, seperti AfD di Jerman dan Partai Kebebasan Austria (FPÖ), berbagi keprihatinan yang sama tentang imigrasi, Islamisasi, dan anggapan kegagalan multikulturalisme. Kemunculan PEGIDA memberikan platform tambahan bagi partai-partai ini untuk terhubung dengan calon pemilih dan memanfaatkan sentimen *anti establishment* yang berkembang.

Sementara PEGIDA dimulai di Jerman, gerakan serupa muncul di negara-negara Eropa lainnya, termasuk Austria, Belanda, dan Belgia. Meskipun tidak ada kepemimpinan pusat atau struktur terpadu, gerakan-gerakan ini memiliki beberapa elemen yang sama dalam hal ideologi dan tujuan: menentang islamisasi, anti-multikulturalisme, nasionalisme dan patriotisme, anti-imigrasi, dan skeptisisme terhadap media arus utama dan politik.

Analisis Aksi Pegida Terhadap Pengungsi Muslim Di Jerman

Sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan etnis, Jerman telah menjadi tempat tinggal bagi berbagai komunitas, termasuk Muslim. Perasaan takut atau kebencian terhadap orang asing atau etnis tertentu dapat menciptakan suasana yang menguntungkan bagi terjadinya kejahatan anti-Muslim. PEGIDA sebagai gerakan yang anti-Muslim, berkontribusi dalam meningkatkan sentimen anti-Muslim dan berkembangnya Islamophobia di Jerman.

Penjelasan aksi PEGIDA diperlukan analisis menggunakan kerangka kerja Islamophobia oleh Runnymede Trust agar mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana gerakan tersebut mencerminkan atau memperkuat Islamophobia. Tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tanda-tanda, perilaku, tuntutan, dan retorika dalam aksi PEGIDA yang mencerminkan karakteristik Islamophobia yang dijelaskan dalam kerangka kerja Runnymede Trust.

Kerangka konsep Islamophobia yang dikembangkan oleh Runnymede Trust, sebuah organisasi riset dan advokasi yang berbasis di Inggris. Kerangka kerja ini didasarkan pada penelitian "Islamophobia: A Challenge for Us All" yang diterbitkan oleh Runnymede Trust pada tahun 1997. Runnymede Trust menjelaskan bahwa Islamophobia memiliki empat aspek yang berkaitan satu

sama lain yaitu, prasangka, pengucilan, diskriminasi, dan kekerasan. Laporan ini mengkaji fenomena Islamophobia dan menyoroti dampaknya terhadap masyarakat Muslim.

a. Aspek Prasangka

Pandangan tertutup didasarkan pada prasangka dan permusuhan, yang merupakan aspek fundamental dari Islamophobia. Pandangan tertutup hanya bertujuan untuk mengecilkan dan menyerang umat Islam tanpa melakukan diskusi dan perdebatan secara langsung dengan umat Islam. Runnymede Trust menjelaskan delapan pandangan tertutup terhadap Islam yang menjadi dasar dari Islamophobia: Islam sebagai monolitik, terpisah dengan budaya lain, inferior, musuh (benturan budaya), manipulatif, Penolakan kritik Muslim terhadap barat (Kritik Muslim terhadap liberalisme, modernisasi, dan sekularisme), Diskriminasi, Islamophobia dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan normal.

Sentimen anti-Muslim di media berita Jerman telah menjadi isu yang memprihatinkan. Hampir 80% media massa Jerman dalam laporannya memberitakan hal-hal negatif tentang Islam seperti memuat gambar ilustrasi yang tidak simpatik terhadap Islam. Media berita Jerman berkontribusi pada penyebaran stereotip negatif terhadap Muslim. Presentasi media tentang pengungsi dan serangan terhadap etnis minoritas seringkali memperkuat prasangka, stereotip, dan klise yang terbentuk dalam masyarakat.

Narasi Islamophobia di Jerman menetapkan umat Islam sebagai ancaman keamanan, tidak dapat diasimilasi, dan bertanggung jawab atas penindasan perempuan yang berlebihan. Muslim sering digambarkan secara negatif di media

Jerman, dengan fokus pada terorisme, kejahatan, dan perbedaan budaya. Penggambaran negatif Muslim di media ini dapat berkontribusi pada stigmatisasi dan diskriminasi terhadap Muslim di masyarakat Jerman.

Pandangan PEGIDA sejalan dengan aspek prasangka pada kerangka Islamophobia yang dikembangkan Runnymede Trust. PEGIDA dikenal menggunakan retorika yang menghasut yang menggambarkan Islam sebagai ancaman bagi budaya dan masyarakat Jerman. Retorika mereka seringkali mencakup generalisasi yang luas dan stereotip negatif tentang Muslim dan keyakinan mereka. Gerakan ini menggunakan istilah-istilah seperti "Islamisasi" atau "Syariah yang merayap" untuk menyatakan bahwa Islam melanggar batas dan merusak nilai-nilai Barat.

PEGIDA cenderung menggunakan pernyataan yang menghasut dan terlibat dalam ujaran kebencian terhadap pengungsi Muslim. Misalnya, pada acara ulang tahun PEGIDA tahun 2015, pembicara utama Akif Pirinçci menyebut pengungsi Muslim sebagai penjajah dan membuat pernyataan menghina mengenai Muslim dan menggunakan bahasa yang menyinggung yang menyatakan bahwa Jerman menjadi "Muslim garbage dump". Selama protes dan demonstrasi berlangsung, PEGIDA menggunakan retorika-retorika yang mengekspresikan sentimen anti-Islam.

Pada tahun 2015, "Saxony remains German" slogan ini terlihat pada pawai PEGIDA di Dresden pada tahun 2015 dan menyiratkan bahwa pengungsi Muslim merupakan ancaman bagi budaya dan nilai-nilai Jerman. Selain itu, "Germany for the Germans" dan "Clear them out", digunakan oleh PEGIDA untuk menunjukkan pandangan etno-nasionalis mereka dan keinginan mereka untuk mengecualikan pengungsi Muslim dari Jerman. Beberapa slogan lainnya seperti "Violence-free and united against religious and proxy wars on German" yang menjelaskan bahwa PEGIDA menentang kekerasan dan ekstremisme, tetapi juga menyiratkan bahwa pengungsi Muslim bertanggung jawab atas perang agama di Jerman.

Pada tahun 2019, PEGIDA melakukan demonstrasi dengan makan daging babi di dekat masjid di Eindhoven. Beberapa peserta membawa spanduk yang bertuliskan “Islam Destroys Civilizations” dan memainkan lagu yang berjudul “Imagine No Islam”. Demonstrasi PEGIDA seringkali menampilkan gestur simbolis yang mencerminkan sikap anti-Islam.

b. Aspek Pengucilan

Aspek pengucilan dalam Islamophobia ini melibatkan keyakinan bahwa Islam pada dasarnya berbeda dari agama dan budaya lain. Muslim sering dipandang sebagai orang luar yang tidak menjadi bagian dari masyarakat setempat. Hal ini juga mengacu pada keyakinan bahwa Islam lebih rendah dari budaya Barat dan bahwa umat Islam terbelakang dan tidak beradab.

Pandangan ini sering digunakan untuk membenarkan praktik-praktik diskriminatif terhadap umat Islam dan pengucilan mereka dari masyarakat lokal. Pengucilan mengacu pada rasa keterpinggiran atau keterasingan yang dialami umat Islam di masyarakat. Hal ini mencakup hambatan sosial, budaya, dan politik yang menghambat integrasi penuh dan partisipasi umat Islam dalam masyarakat luas. Pengucilan dapat diakibatkan oleh praktik-praktik diskriminatif, sikap berprasangka, dan ketidaksetaraan struktural yang menciptakan rasa "keberbedaan" bagi umat Islam.

Tindakan PEGIDA berkontribusi pada keterasingan pengungsi Muslim di Jerman. Retorika anti-Islam gerakan tersebut menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat, sehingga sulit bagi pengungsi Muslim untuk berintegrasi ke dalam masyarakat. Demonstrasi dan protes PEGIDA, yang dipicu oleh xenophobia dan Islamophobia, semakin meminggirkan dan mengisolasi

pengungsi Muslim, mencegah partisipasi penuh dalam masyarakat Jerman. PEGIDA telah mendorong perpecahan dan ketegangan sosial di antara berbagai komunitas, termasuk Muslim dan pengungsi. Polarisasi semacam itu dapat menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpercayaan, mempersulit pengungsi dan imigran untuk berintegrasi ke dalam masyarakat Jerman.

PEGIDA telah berkontribusi pada diskriminasi rasial terhadap Muslim, yang terlihat dalam pengucilan dari pasar tenaga kerja. Islamofobia dan sentimen anti-imigran dapat menciptakan hambatan bagi individu yang berlatar belakang Muslim dalam mencari peluang kerja. Perilaku, praktik, atau pakaian yang berakar pada tradisi Islam dapat disalah artikan atau dianggap mengancam. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi halus dalam interaksi sehari-hari, termasuk di tempat kerja.

c. Aspek Diskriminasi

Diskriminasi mengacu pada perlakuan yang tidak setara terhadap umat Islam di berbagai bidang seperti pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Muslim sering dikecualikan dari masyarakat dan menghadapi diskriminasi di tempat kerja dan layanan publik. Hal ini termasuk cara-cara di mana institusi, seperti media, pemerintah, dan sistem pendidikan, mengabadikan stereotip negatif tentang Muslim dan Islam. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi terhadap umat Islam di berbagai bidang seperti pekerjaan, perumahan, dan pendidikan.

Tindakan PEGIDA terhadap pengungsi Muslim juga dapat dilihat sebagai bentuk diskriminasi. Diskriminasi ini terwujud dalam berbagai cara, termasuk pelecehan verbal, ujaran kebencian, dan upaya untuk membatasi hak dan kebebasan pengungsi Muslim. Sikap diskriminatif seperti itu menghambat perlakuan dan kesempatan yang sama bagi pengungsi Muslim, melanggengkan

ketidaksetaraan sosial dan struktural. Protes dan retorika gerakan berkontribusi pada stigmatisasi dan pengucilan pengungsi Muslim, yang berpotensi mempengaruhi akses pengungsi ke pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang lainnya.

Muslim di Jerman sering menghadapi diskriminasi, kebencian, dan terkadang kekerasan yang merajalela dalam kehidupan sehari-hari mereka, menurut sebuah laporan baru yang ditugaskan oleh kementerian dalam negeri di Berlin. Laporan tersebut menemukan bahwa banyak dari 5,5 juta Muslim di Jerman mengalami pengucilan dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari – termasuk kebencian dan kekerasan.

d. Aspek Kekerasan

Kekerasan mengacu pada tindakan agresif baik fisik atau verbal yang ditargetkan pada umat Islam. Pada 2019, sebanyak 871 kejahatan kebencian anti-Muslim dilaporkan di Jerman. Namun, diperkirakan bahwa statistik ini hanya mewakili sebagian kecil dari kejadian yang sebenarnya. Hal tersebut mencakup peristiwa anti-Muslim, termasuk juga laporan penyerangan, pelecehan verbal, ancaman, diskriminasi, vandalisme, dan demonstrasi yang menargetkan Muslim di Jerman. Survei opini publik di Jerman menunjukkan meningkatnya ketakutan dan penentangan terhadap Muslim.

Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa 57% orang Jerman percaya bahwa Islam merupakan ancaman, 61% percaya bahwa Islam tidak sesuai dengan Barat, dan 40% merasa seperti orang asing di negara mereka sendiri karena Islam. Tindakan PEGIDA telah menyebabkan peningkatan kekerasan anti-Muslim di Jerman. PEGIDA mendiskriminasi Muslim berdasarkan ras atau etnis mereka, yang dapat mencakup kekerasan rasial dan diskriminasi lainnya yang berakibat pada berkembangnya tren Islamophobia di banyak bagian negara.

Sepanjang tahun 2015, tercatat sekitar 1.408 kasus tindak kekerasan dan sebanyak 75 kali aksi pembakaran kamp yang tertuju pada para pengungsi di Jerman. Sebuah tempat penampungan pengungsi di Saxony diserang oleh sekelompok orang yang meneriakkan slogan-slogan anti-Muslim dan melemparkan kembang api ke gedung. Kementerian Dalam Negeri melaporkan bahwa ekstrimis sayap kanan melakukan 90% dari semua kejahatan kebencian termasuk 96% kejahatan kebencian xenophobia, 91% dari kejahatan kebencian antisemit, dan 98% kejahatan rasial. Gerakan yang berada di kanan juga bertanggung jawab atas 90% pelanggaran terhadap tempat penampungan suaka.

Demonstrasi lainnya terjadi di di Leipzig, kota di wilayah timur Jerman yang diselenggarakan oleh LEGIDA, cabang lokal kelompok nasionalis sayap kanan Jerman PEGIDA. Sebanyak 200 demonstran pendukung sayap kanan mengenakan topeng dan membawa plakat berunjuk rasa di kota Leipzig. Aksi ini berujung rusuh ketika massa mulai mengamuk, melontarkan kalimat rasis, melemparkan kembang api, memecahkan jendela dan merusak bangunan. Sekitar 2.000 demonstran anti-Muslim yang menyebut diri sebagai PEGIDA meluncurkan unjuk rasa dengan berjalan kaki secara damai di pusat kota.

Pada 2017, sekelompok pendukung PEGIDA menyerang sekelompok pengungsi di Bautzen, melempar botol dan meneriakkan slogan-slogan anti-Muslim. Insiden itu terekam dalam video dan dibagikan secara luas di media sosial. Pada tahun 2018, sekelompok pendukung PEGIDA menyerang sekelompok wanita dan anak-anak Muslim di Berlin, meneriakkan cercaan anti-Muslim dan melempari mereka dengan botol dan batu. Insiden itu juga terekam dalam video dan dibagikan secara luas di media sosial. Insiden ini menunjukkan sifat kekerasan dan diskriminatif dari beberapa tindakan PEGIDA terhadap pengungsi Muslim di Jerman. Mereka berkontribusi pada kekerasan terhadap pengungsi Muslim.

Tanggapan Pemerintah Jerman Terhadap Aksi Pegida

Pemerintah Jerman, termasuk Kanselir Angela Merkel, menyatakan keprihatinan atas pesan dan retorika PEGIDA, yang dianggap memecah belah dan xenophobia. Para pemimpin dan pejabat politik sering menekankan pentingnya toleransi, keragaman, dan penghormatan terhadap semua agama dan budaya dalam masyarakat Jerman. Badan intelijen domestik di Jerman, seperti BfV (Bundesamt für Verfassungsschutz), bertanggung jawab untuk memantau dan menganalisis aktivitas ekstrimis di Jerman, termasuk ekstremisme sayap kanan, ekstremisme sayap kiri, dan ekstremisme Islam. BfV bekerja sama dengan LfV (Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen), yang merupakan badan intelijen domestik negara bagian Sachsen federal Jerman. Fungsi utamanya adalah observasi dan pengawasan kegiatan anti-konstitusional di negara bagian Saxony Jerman.

LfV telah meningkatkan pengawasan terhadap gerakan anti-Islam PEGIDA karena kelompok tersebut telah menjadi "ekstremis" dan "anti-konstitusi". Presiden Saxony LfV Dirk-Martin Christian, mengatakan bahwa gerakan ini berfungsi sebagai penghubung antara ekstrimis dan non-ekstrimiskarena secara teratur memberikan platform kepada ekstrimissayap kanan untuk menyebarkan ideologi anti-konstitusional. Di Jerman, suatu kelompok atau organisasi dapat dianggap anti-konstitusi jika bertindak bertentangan dengan prinsip dan nilai yang diabadikan dalam Konstitusi Jerman, yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar (Grundgesetz). Kriteria untuk menunjuk suatu kelompok sebagai anti-konstitusi berada di bawah yurisdiksi BfV.

1. Pelanggaran Prinsip Demokrasi
2. Mendorong Kekerasan atau Terorisme
3. Ideologi Rasis, Xenophobia, atau Diskriminatif.
4. Ancaman terhadap Tatanan Konstitusi.

5. Pandangan Anti-Semit atau Anti-Pluralistik.
6. Kegiatan Subversif.

Setelah diterapkannya kebijakan Pintu Terbuka, tingkat kejahatan di Jerman yang dilakukan oleh para pengungsi meningkat cukup pesat, yang menyebabkan warga Jerman merasa tidak aman di negaranya sendiri. Sebuah penelitian menemukan bahwa kesenjangan sosial yang dialami pengungsi selama berada di Jerman menjadi penyebab utama mereka melakukan kejahatan. PEGIDA berkontribusi dalam memperkuat kesenjangan sosial pada pengungsi dan imigrasi.

PEGIDA berfokus pada anti-Islam dan anti-pengungsi, dan telah menarik dukungan dari individu yang merasa khawatir terhadap perubahan sosial dan budaya yang disebabkan oleh kedatangan pengungsi di Jerman.

KESIMPULAN

Berdasarkan kerangka kerja Runnymede Trust peneliti mendapatkan empat temuan. Pertama, dilihat dari aspek prasangka, demonstrasi PEGIDA seringkali menampilkan simbol yang menunjukkan sikap anti-islam seperti melabeli muslim sebagai “penjajah”, “teroris”, atau “fundamentalis”. PEGIDA juga menunjukkan spanduk dengan slogan yang provokatif seperti “Islam keluar dari Jerman” atau “Hentikan islamisasi Eropa”. Kedua, dilihat dari aspek pengucilan, retorika yang di pakai anti-muslim dan anti-imigran PEGIDA cenderung menciptakan persepsi negatif terhadap pengungsi dan imigran.

Polarisasi terhadap opini ini membuat terkucilkannya umat muslim sehingga mayoritas umat muslim di Jerman mendapat perlakuan diskriminasi di berbagai bidang, termasuk sulitnya mendapatkan pekerjaan, tidak bisa berpartisipasi dalam politik dan lainnya. Ketiga, dilihat dari aspek diskriminasi, diskriminasi yang dilakukan anti-muslim dilakukan dengan berbagai cara seperti pelecehan verbal, ujaran kebencian, dan upaya untuk membatasi hak dan kebebasan pengungsi Muslim. Diskriminasi ini berujung pada sulitnya akses

pengungsi ke pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan dan peluang lainnya. Keempat, dilihat dari aspek kekerasan, PEGIDA telah menyebabkan peningkatan kekerasan anti-muslim di Jerman.

Demonstrasi dan protes PEGIDA, yang menolak migrasi atau menyebarkan retorika anti-pengungsi, dapat mempengaruhi opini dan persepsi masyarakat terhadap pengungsi secara keseluruhan. Hal ini dapat berdampak pada kesenjangan sosial antara komunitas pengungsi dengan masyarakat Jerman, menyebabkan perpecahan dan ketegangan dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, adapun upaya yang dilakukan pemerintah Jerman yaitu upaya dalam negeri yang meliputi kontrol pengungsi dan pemeriksaan ketat di perbatasan dan pengendalian perbatasan, mempercepat proses pemberian suaka dan mendeportasi pengungsi pengungsi yang tidak memenuhi syarat, mendistribusikan barang-barang non tunai, memberikan dukungan keuangan yang lebih besar kepada kota-kota yang banyak menampung pengungsi dan mencabut hak istimewa pengungsi. Kemudian adapun upaya luar negeri yang meliputi pembagian kuota pengungsi secara merata ke semua anggota negara Uni Eropa, menerapkan kembali peraturan Dublin dan bekerjasama dengan Turki.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Christopher. 2016. *Islamophobia*. London: Routledge.
- Bakali, Naved. 2016. *Islamophobia: Understanding Anti-Muslim Racism through the Lived Experiences of Muslim Youth*. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.
- Bani Salameh, Mohammed T. 2019. "Migration from the Arab Spring Countries to Europe: Causes and Consequences." *Smart Technologies and Innovation for a Sustainable Future*, 243–54.
- Bauböck, Rainer. 2017. "Refugee Protection and Burden-Sharing in the European Union." *JCMS: Journal of Common Market Studies* 56 (1): 141–56.
- Bergfeld, Mark. 2017. "Islamophobia, Employment Discrimination and the Labor Movement." The ILR School | Cornell University. 2017. <https://www.ilr.cornell.edu/post/islamophobia-employment-discrimination-and-labor-movement>.

- Bhimji, Fazila. 2020. "The Everyday Racialisation of Refugees in German State and Society." *Border Regimes, Racialisation Processes and Resistance in Germany*, 23–47.
- Bitschnau, Marco, Dennis Lichtenstein, and Birte Fährnich. 2021. "The 'Refugee Crisis' as an Opportunity Structure for Right-Wing Populist Social Movements: The Case of Pegida." *Studies in Communication Sciences* 21 (2): 1–13.
- Bleich, Erik. 2012. "Defining and Researching Islamophobia." *Review of Middle East Studies* 46 (2): 180–89.
- Bock, Jan-Jonathan. 2018. "State Failure, Polarisation, and Minority Engagement in Germany's Refugee Crisis." *International Journal of Politics, Culture, and Society* 31 (4): 375–96.
- Bode, Lisa De. n.d. "Pegida Movement Spreads across Europe, Stirs Anti-Immigrant Sentiment." Al Jazeera America. diakses 21 juli, 2023. <http://america.aljazeera.com/articles/2015/1/14/anti-islam-pegidamovementspreadsacrosseurope.html>.
- Bucerius, Sandra M. 2014. *Unwanted: Muslim Immigrants, Dignity, and Drug Dealing*. Oxford: Oxford University Press.
- Busch, Austin. 2020. "Americanizing the Nuremberg Laws: Alternative-Historical Racial Reconfigurations in the Plot against America." *MELUS* 45 (3): 152–79.
- Butterwegge, Christoph. 2014. "Mass Media, Immigrants and Racism in Germany : A Contribution to an Ongoing Debate." *Communications*.
- Caiani, Manuela, and Patricia Kröll. 2017. "Nationalism and Populism in Radical Right Discourses in Italy and Germany." *Javnost - The Public* 24 (4): 336–54.
- Elahi, Farah, and Omar Khan. 2017. *Islamophobia: Still a Challenge for Us All*. London: Runnymede.
- Eurostat. 2016. "Record Number of over 1.2 Million First Time Asylum Seekers Registered in 2015." Record Number of over 1.2 Million First Time Asylum Seekers Registered in 2015 - Products Euro Indicators - Eurostat. 2016. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/-/3-04032016-ap>.
- Funk, Nanette. 2018. "A Spectre in Germany: Refugees, A 'Welcome Culture' and an 'Integration Politics.'" *Refugee Crisis* :, 44–54.
- Futák-Campbell, Beatrix, and Mira Pütz. 2021. "From the 'Open Door' Policy to the EU-Turkey Deal: Media Framings of German Policy Changes during the EU Refugee 'Crisis.'" *International Relations* 36 (1): 61–82.
- Griessler, Christina, Melani Barlai, Birte Fährnich, Markus Rhomberg, and Peter Filzmaier. 2017. *The Migrant Crisis: European Perspectives and National Discourses*. Zürich: LIT Verlag.
- Haekal, Ranga Mufades. 2019. "Kemunculan Pegida Sebagai Gerakan Anti-Islam Di Jerman." Thesis, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Univeritas Muhammadiyah Malang. .

- HAJIYEVA, Aytan Merdan, and Fakhri HAJIYEV. 2016. "Migration Crisis in Europe: Political, Socio-Economic Reasons and Challenges, Ways of Solution." *Journal of Social Sciences* 5 (2): 31–35.
- Haller, André, and Kristoffer Holt. 2018. "Paradoxical Populism: How Pegida Relates to Mainstream and Alternative Media." *Information, Communication & Society* 22 (12): 1665–80.
- Hartz, Ronald. 2018. "'The People' and Its Antagonistic Other: The Populist Right-Wing Movement Pegida in Germany." *Postdisciplinary Studies in Discourse*, 223–44.
- Hernández Aguilar, Luis Manuel. 2019. "Countering Islamophobia in Germany." *Countering Islamophobia in Europe*, 289–322.
- Huda, Mualimul. 2015. "The Project of Islamophobia." *Qudus International Journal of Islamic Studies* 3 (2).
- Huntington, Samuel P. 2014. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. London: Penguin.
- Jaber, Nihaya. 2022. "Islamophobia: Definition, History, and Aspects." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 5 (2): 327–38.
- Khader, Bichara. 2016. "Muslims in Europe: The Construction of a 'Problem.'" OpenMind. Catholic University of Louvain. <https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/muslims-in-europe-the-construction-of-a-problem/>.
- Khaira, A. N., Yusra, M., & Dermawan, R. (2022). Angela Merkel's Perception and Open Door Policy during the 2015 European Refugee Crisis. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 18(1), 1–13.
- Kirschbaum, Erik. 2014. "Patriotic Europeans against the Islamisation of the West Quickly Gathering Support in Germany." *The Sydney Morning Herald*. <https://www.smh.com.au/world/patriotic-europeans-against-the-islamisation-of-the-west-quickly-gathering-support-in-germany-20141216-128105.html>.
- Lazaridis, Gabriella, and Khursheed Wadia. 2015. *The Securitisation of Migration in the EU: Debates since 9/11*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Lüthke, Albrecht, and Ingo Müller. 2018. "Ausländerfeindliche Gewalt – Das Beispiel Rostock-Lichtenhagen." *Strafjustiz Für Nicht-Juristen*, 97–104.
- Massoumi, Narzanin, Tom Mills, and David Miller. 2017. *What Is Islamophobia?: Racism, Social Movements and the State*. Pluto Press.
- Matthay, Sabina. 2017. "Negotiating National Identity: German Intellectuals Debate the 2015 Migrant Influx." *The European Legacy* 22 (7–8): 769–78.
- Nauvarian, Demas. 2021. "Tantangan Supranasionalitas Uni Eropa: Komparasi Integrasi Politik Pada Krisis Eurozone 2008 Dan Krisis Pengungsi 2015." *Indonesian Journal of International Relations*, 1, 5: 62–79.
- Ningrum, Andi Arie Setya. 2016. "Eksistensi Kelompok Pegida Serta Propaganda Anti-Pencari Suaka Dan Islamofobia Di Jerman." *Journal of International Relations* 2 (4): 1–9.

- Pertiwi, Lunyka Adelina. 2016. "Kompleksitas Rezim Di Uni Eropa: Upaya Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Volume 19 (3)*: 218–33.
- Runnymede Trust. n.d. "Islamophobia: A Challenge for Us All." Islamophobia: A Challenge For Us All. Diakses 21 Juli, 2023. <https://www.runnymedetrust.org/publications/islamophobia-a-challenge-for-us-all>.
- Said, Edward W. 2021. *Orientalism*. London, UK: Penguin.
- Salata, Oksana. 2020. "ANTI-SEMITIC Propaganda of Nazi Germany in the Occupied Territories of Ukraine during 1941-1944." *Skhid o (6(170))*: 26–33.
- Sayyid, S. 2014. "A Measure of Islamophobia." *Islamophobia Studies Journal 2 (1)*: 10–25.
- Vorländer, Hans, Maik Herold, and Steven Schäller. 2018a. "Pegida in the Context of German Right-Wing Populism." *PEGIDA and New Right-Wing Populism in Germany*, 51–72.
- Vorländer, Hans, Maik Herold, and Steven Schäller. 2018b. "The Development of PEGIDA: From a Movement of the Outraged to a Protest Ritual." *PEGIDA and New Right-Wing Populism in Germany*, 1–30.
- Zaki, Muhammad. 2019. "Pengaruh Kebijakan Imigrasi Terbuka Terhadap Kemunculan Gerakan Populisme Sayap Kanan (Pegida) Di Jerman Tahun 2014-2016." Thesis, Jakarta: Universitas Bakrie. Universitas Bakrie. .
- Zunes, Stephen. 2017. "Europe's Refugee Crisis, Terrorism, and Islamophobia." *Peace Review 29 (1)*: 1–6.
- Önnerfors, Andreas. 2020. "'Retrotopia' as a Retrogressive Force in the German Pegida-Movement." *Nostalgia and Hope: Intersections between Politics of Culture, Welfare, and Migration in Europe*, 135–49.